

# **PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA AMBAIPUA, KECAMATAN RANOMEETO, KABUPATEN KONAWA SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PILKADA SESUAI DENGAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) COVID-19**

<sup>1</sup>Ld. Muh. Syahartijan, <sup>2</sup>Dian Trianita Lestari, <sup>3</sup>Iriyani Astuti Arief, <sup>4</sup>Amin Tunda

<sup>1234</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo

Email: [syahartijanlaode@gmail.com](mailto:syahartijanlaode@gmail.com); [dian.trianita@uho.ac.id](mailto:dian.trianita@uho.ac.id); [riyanirief@gmail.com](mailto:riyanirief@gmail.com); [amin.tunda@uho.ac.id](mailto:amin.tunda@uho.ac.id)

## **RINGKASAN**

Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul: Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sesuai dengan Prosedur Tetap Covid-19 dilakukan karena masyarakat di lokasi program pengabdian masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai kesadaran dalam menyalurkan hak politiknya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin menurun. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dengan tetap mengikuti prosedur tetap pencegahan covid-19. Untuk itu, tim pengabdian akan melakukan sosialisasi berbentuk pengenalan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui metode sosialisasi ini, tim pengabdian melakukan transfer ilmu dan nilai ke masyarakat dengan bantuan media seperti poster dan materi dalam bentuk power point. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian bekerja sama dengan mitra yaitu Pemerintah Desa Ambaipua yang diwakili oleh Kepala Desa Ambaipua. Secara umum, kegiatan pengabdian ini telah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Ambaipua mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada untuk kemajuan pembangunan desanya. Melalui kegiatan ini masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjadi pemilih yang berintegritas. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi mengenai tata cara menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan protap covid-19 untuk pilkada pada bulan Desember 2020.

**Kata kunci: Desa Ambaipua; Partisipasi Masyarakat; Pendidikan Politik; Pilkada; Protap Covid-19**

### **A. Analisis Situasi**

Kebebasan politik seseorang dijamin dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Karena dalam sistem demokrasi terdapat hak-hak politik yang dimiliki oleh semua manusia, tanpa adanya perbedaan satu dengan lainnya. Sama halnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak politik juga bisa dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap individu, baik itu hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih dengan syarat-syarat tertentu. Kebebasan politik bisa didapatkan apabila setiap individu menyadari akan pentingnya

pendidikan politik. Jika seluruh warga masyarakat telah menyadari pentingnya pendidikan politik, otomatis mereka akan ikut berpartisipasi dalam membentuk sebuah pemerintahan yang sehat, melalui pemilihan umum (Pemilu). Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang politik dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem demokrasi, dimana setiap warga negaranya sudah mulai menyadari akan pentingnya pendidikan politik untuk mendukung peningkatan sistem demokrasi. Dibuktikan dalam pemilihan umum serentak yang mulai diadakan beberapa tahun terakhir ini, mulai dari pemilu calon anggota legislatif tingkat Pusat, Daerah, dan Kabupaten pada tahun 2019. Kemudian pemilihan calon kepala daerah (Bupati) yang dimulai tahun 2015, terbagi dalam empat gelombang. Gelombang Pertama, Pilkada tahun 2015 untuk pemilihan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun itu atau pada semester pertama ditahun 2016. Kemudian, gelombang kedua, dilaksanakan pada tahun 2017 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017. Sedangkan gelombang ketiga, digelar pada tahun 2018 untuk Bupati yang masa jabatannya habis pada tahun 2018 dan 2019. Ketiga gelombang pemilihan kepala daerah serentak ini, telah dilaksanakan dengan lancar. Karena masyarakat Indonesia mulai memahami pendidikan politik dengan mengikuti pesta demokrasi ini, baik itu sebagai calon bupati untuk dipilih, maupun sebagai warga yang memberikan suara dalam pemilihan calon bupati tersebut.

Pemilu serentak yang diadakan dalam gelombang pertama, kedua dan ketiga tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, karena pada saat dilaksanakan pesta demokrasi tersebut kondisi dalam negeri cenderung aman dan tidak ada ancaman dari manapun. Berbeda pada saat sekarang ini dimana kondisi dalam negeri sedang tidak aman, karena terjadi penyebaran virus corona (Covid-19). Gelombang keempat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dimana pada pilkada serentak ini ada tujuh wilayah kabupaten yang masa jabatan Bupatiya akan segera berakhir. Ketujuh wilayah tersebut adalah Wakatobi, Buton Utara, Muna, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan.

Virus corona sudah mulai menyebar dan memakan korban di Indonesia, sekitar bulan Maret 2020. Hingga sekarang jumlah korban yang positif terkena virus corona mencapai Sembilan Puluh Ribu lebih orang. Melihat fakta banyaknya korban, pemerintah mulai membentuk sebuah aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dalam aturan tersebut masyarakat dilarang berpergian melewati wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi yang ditinggalinya. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk keluar rumah, jika tidak ada keperluan mendesak seperti berbelanja ke Pasar/Swalayan atau ke Bank/ATM. Selain itu, pemerintah memberlakukan beberapa aturan diantaranya larangan berkumpul dikeramaian untuk menghindari penyebaran virus yang semakin *massive*, dengan menutup Mall-mall besar, bioskop, rumah makan dan cafe, meliburkan sekolah-sekolah, perkantoran, serta penutupan sementara rumah ibadah yang biasa menjadi pusat pertemuan orang banyak.

Setelah PSBB, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yakni *New Normal* (Kebiasaan Baru). Dalam kebijakan ini pemerintah mulai fleksibel dalam mengatur interaksi yang dilakukan masyarakat. Pemerintah menerapkan Protokol Tetap (Protap) bagi masyarakat yang terpaksa harus melakukan kegiatan di luar rumah, seperti mewajibkan setiap individu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *handsanitizer*. Apabila sedang dalam antrian maka wajib menjaga jarak masing-masing orang sekitar 1,5 Meter. Pemerintah juga sudah mengizinkan beroperasinya pusat-pusat perbelanjaan dan rumah makan, serta mulai membuka perkantoran, rumah ibadah dan sarana publik lainnya dengan mematuhi Protap yang telah ditentukan.

Pemilihan Kepala Daerah di Konawe Selatan akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Jika jumlah korban tidak berkurang sampai pada hari pesta demokrasi ini dilaksanakan, maka kemungkinan besar jumlah warga masyarakat yang hadir dalam memberikan suaranya akan berkurang. Disinilah pentingnya diperkenalkan atau pendalaman pendidikan politik bagi setiap warga, untuk meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik setiap individu berbeda-beda, tergantung bagaimana individu tersebut

memandang politik itu seperti apa. Ada yang memandang politik itu identik dengan kekuasaan, ada yang memandang bahwa politik itu sirkulasi kekuasaan melalui kompetisi (persaingan), dan ada yang memandang politik itu merupakan pembebasan individu dari ketidakadilan sosial dan struktural. Dalam kasus ini pendidikan politik dipandang sebagai sirkulasi kekuasaan melalui persaingan, dimana ada beberapa calon yang saling bersaing untuk menjadi Kepala Daerah, namun terhambat dengan adanya Covid-19 ini. Para calon Bupati tidak bisa maksimal dalam melakukan upaya-upaya untuk bersaing satu dengan yang lainnya. Misalkan saja, sebelum Pilkada berlangsung seharusnya ada Kampanye-kampanye politik oleh para calon Bupati yang biasa dilaksanakan di lapangan terbuka dan mengumpulkan massa sebanyak mungkin, yang bertujuan untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja dari calon bupati tersebut. Namun dengan dimasa pandemi Covid-19 ini, para Calon Bupati tidak bisa melaksanakan hal tersebut.

Pemahaman pendidikan politik yang baik akan mewujudkan partisipasi politik yang baik pula. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi pada pelaksanaan suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dan kepala daerah dalam pemilihan umum. Dari beberapa kegiatan dalam partisipasi politik, yang sangat berkaitan dengan Pilkada di Konawe Selatan ini adalah mengajukan alternatif pemimpin dan rakyat dengan bebas bisa memilih calon kepala daerah yang dikehendaki dalam Pilkada, tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Pada masa sekarang ini, dimana virus Corona masih terjadi penambahan korban dan belum ditemukan vaksin atau obat yang dapat memusnahkannya. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi warga masyarakat yang hendak memberikan suara pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah ditentukan. Covid-19 merupakan ancaman yang sangat mematikan, apabila warga masyarakat tidak menjalankan Protap (Prosedur Tetap) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun apabila rakyat mampu memenuhi dan mengindahkan aturan yang ditetapkan oleh

pemerintah, mereka bisa datang ke TPS memberikan suaranya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, atau menggunakan *handsanitizer*. Dari pihak pemerintahpun sudah menghimbau masyarakat agar tidak takut datang ke TPS, selama mengikuti Protap yang berlaku. Himbauan ini dilakukan dengan media-media *online* dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang menampilkan poster-poster berisi ajakan untuk tidak Golput dan beberapa aturan dalam Protap, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, atau menggunakan *handsanitizer*.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Ambaipua pada tanggal 19 Oktober 2020, dimulai pukul 09.00 pagi hingga pukul 11.00. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan yang menjadi mitra ialah Pemerintah Desa Ambaipua yang diwakili oleh Kepala Desa Ambaipua dan Komisioner KPU Kota Kendari Bapak Dr. Asril, S.Sos., M.Si., yang berperan sebagai narasumber dalam kegiatan. Untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat Desa Ambaipua sesuai dengan protap covid-19, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian dengan tahapan berikut:

- a. Tim pengabdian bekerja sama dengan salah seorang Komisioner dari KPU Kota Kendari sebagai pemateri tambahan yang akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan pemilu sesuai dengan protap covid-19
- b. Tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan komunikasi publik dan pemberian pengetahuan baru dalam ilmu politik dengan menggunakan media
- c. Diskusi dengan masyarakat dalam bentuk tanya jawab

Adapun langkah evaluasi pelaksanaan program setelah kegiatan pengabdian dilakukan melalui identifikasi faktor pendukung dan penghambat kegiatan. Hal ini diperlukan agar ketika program ini akan dilaksanakan kembali, baik di lokasi yang sama maupun lokasi yang lainnya, akan meminimalisir kekurangan pada kegiatan. Di satu sisi,

keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKMI selesai dilaksanakan, dilakukan dengan mekanisme kontrol berdasarkan hasil dari Pilkada, yaitu ada atau tidaknya peningkatan jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020. Jika belum terdapat peningkatan, maka diperlukan program selanjutnya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul: Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sesuai dengan Prosedur Tetap Covid-19 dilaksanakan dengan cara pemaparan materi oleh tim pengabdian dan mitra serta ditutup dengan tanya jawab. Pemaparan materi dari tim pengabdian yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendekatan komunikasi publik dan pemberian pengetahuan baru dalam ilmu politik dengan menggunakan media. Sementara itu, mitra kegiatan ini yaitu Bapak Dr. Asril, S.Sos., M.Si., memberikan pemahaman lebih teknis kepada para peserta mengenai langkah-langkah pelaksanaan pemilu sesuai dengan protap covid-19.

Pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh tiga orang tim dosen pengabdian bekerja sama dengan mitra yakni KPU Kota Kendari dan dihadiri oleh Kepala Desa Ambaipua dan aparat desa serta perwakilan masyarakat Desa Ambaipua. Adapun pokok bahasannya ialah sebagai berikut:

1. Pemaparan materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat Desa Ambaipua dengan pendekatan komunikasi publik dan pemberian pengetahuan baru dalam ilmu politik dengan menggunakan media,
2. Pemaparan materi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat Desa Ambaipua mengenai langkah-langkah pelaksanaan pemilu sesuai dengan protap covid-19,
3. Diskusi dengan masyarakat Desa Ambaipua, dan
4. Evaluasi hasil kegiatan pengabdian yang telah disusun.

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian sambutan oleh Kepala Desa Ambaipua, Bapak Marman S.Sos., sekaligus membuka kegiatan pengabdian. Secara umum, Kepala Desa berterima kasih karena Desa Ambaipua terpilih sebagai lokasi untuk dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat oleh tim dari FISIP, Universitas Halu Oleo. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Desa secara simbolis.

Selanjutnya, tim pengabdian diwakili oleh ketua tim memperkenalkan tim pengabdian kepada peserta yakni masyarakat Desa Ambaipua serta menyampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan ini. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tim pengabdian dari tinjauan akademis dan narasumber dari segi teknis.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang antara lain yakni:

1. Bagaimana meningkatkan kualitas pemilu dari pimpinan karena kebanyakan pimpinan seringkali melupakan janji-janji kampanyenya/ tidak ada integritas? (Bapak Harianto)
2. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT atau belum memiliki KTP, langkah apa yang harus ditempuh? Bagaimana tata cara memilih untuk warga yang sedang sakit pada saat pemungutan suara? (Bapak Marman)
3. Berapa persen suara yang harus terkumpul dalam suatu pemilihan untuk diputuskan perlu diadakan pemungutan suara ulang? (Bapak Tijan)

Secara umum, kegiatan pengabdian ini telah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Ambaipua mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada untuk kemajuan pembangunan desanya. Melalui kegiatan ini masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjadi pemilih yang berintegritas. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi mengenai tata cara menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan protap covid-19 untuk pilkada pada bulan Desember 2020.

## **2. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan**

Sebagai salah satu wujud dari demokrasi Pemilu dipahami sebagai Prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas. Selain itu, Pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan (*representative government*). Robert Dahl mengungkapkan bahwa Pemilu merupakan gambaran ideal untuk menggambarkan sebuah pemerintahan demokrasi di zaman modern, karena Pemilu sebagai prosedur demokrasi untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi dan Undang-undang Dasar Negara. (A.A Sahid Gatara. 2009, Hlm.207)

Ada beberapa jenis Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, yakni : **Pertama**, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Kedua**, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Ketiga**, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sistem demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan cukup baik. Meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan demokratisasi dengan cara melaksanakan pemilu serentak di beberapa Provinsi di Indonesia. Mulai tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan secara serentak di Indonesia, melalui empat gelombang. Gelombang Pertama, Pilkada tahun 2015 untuk pemilihan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun itu atau pada semester pertama ditahun 2016. Kemudian, gelombang Kedua,

dilaksanakan pada tahun 2017 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017. Sedangkan gelombang Ketiga, digelar pada tahun 2018 untuk Bupati yang masa jabatannya habis pada tahun 2018 dan 2019. Ketiga gelombang pemilihan kepala daerah serentak ini, telah dilaksanakan dengan lancar. Karena masyarakat Indonesia mulai memahami pendidikan politik dengan secara aktif berpartisipasi dalam pesta demokrasi, baik itu sebagai calon bupati untuk dipilih, maupun sebagai warga yang memberikan suara dalam pemilihan calon bupati tersebut.

Pemilu serentak yang diadakan dalam gelombang pertama, kedua dan ketiga tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, karena pada saat dilaksanakannya Pemilu tersebut kondisi dalam negeri cenderung aman dan tidak ada ancaman dari manapun. Berbeda pada saat sekarang ini dimana kondisi dalam negeri sedang tidak aman, karena terjadi penyebaran virus corona (Covid-19). Gelombang keempat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dimana pada pilkada serentak ini ada tujuh wilayah Kabupaten yang masa jabatan Bupati akan segera berakhir. Ketujuh wilayah tersebut adalah Wakatobi, Buton Utara, Muna, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara akan dilaksanakan pada tujuh wilayah Kabupaten seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tentunya memiliki permasalahan tersendiri dalam menghadapi Pemilihan kepala daerahnya. Apalagi sekarang terdapat permasalahan global yang sedang dihadapi bangsa kita, yakni penyebaran virus Corona (Covid-19). Penyebaran virus Corona ini, menghambat berbagai kegiatan publik yang dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang. Saat ini pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan-kegiatan yang berinteraksi langsung dengan orang banyak, hal ini untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Mengingat sudah sangat banyak korban dari masyarakat Indonesia yang terkena virus ini, dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia.

Sebelum Pilkada berlangsung ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dalam mendapatkan dukungan dari warga, salah satunya adalah melalui

kampanye politik. Pada umumnya kampanye politik dilakukan dengan mengumpulkan massa sebanyak mungkin di tempat-tempat terbuka (lapangan), dengan mendatangkan artis-artis Ibu kota untuk menghibur massa pendukung tersebut. Dalam kampanye tersebut, para calon Bupati menyampaikan visi dan misi, serta janji-janji politiknya. Jika Kampanye politik dilaksanakan dalam kondisi normal sebelum merebaknya virus corona ini, maka itu akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam terpilihnya Bupati dan Wakilnya. Karena para calon Bupati dan Wakil Bupati akan berupaya menggelar Kampanye Akbar yang melibatkan sebanyak-banyaknya warga, agar bisa mendapatkan dukungan dan menjadi Bupati terpilih. Berbeda dengan masa sekarang, virus corona telah menyebar semakin parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga, pelaksanaan kampanye politik ini akan ditiadakan dan digantikan dengan kampanye-kampanye politik secara *online*, melalui Sosial Media (*Website, Facebook, Instagram dan Twitter*).

Sama halnya dengan kampanye politik di lapangan yang pelaksanaannya ditiadakan, karena menghindari kerumunan massa yang bisa menyebarkan virus secara langsung. Pelaksanaan Pilkada melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa saja menimbulkan penyebaran virus secara *massive*, karena dilakukan ditempat/lapangan yang mengumpulkan banyak orang. Hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang hendak memilih, mengurungkan niatnya untuk datang ke TPS untuk memilih calon Bupati dan Wakilnya. Untuk menghindari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pada 09 Desember mendatang, perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa pengenalan dan pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan politik untuk menentukan masa depan suatu wilayah Kabupaten yang diselenggarakan Pilkada tersebut.

Salah satu wilayah Kabupaten yang melaksanakan Pilkada secara langsung adalah Kabupaten Konawe Selatan. Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan Pendidikan Politik bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat desa Ambaipua sangat dibutuhkan dalam Pilkada di

Konawe Selatan. Hal ini berkaitan dengan manfaat dari Pemilu itu sendiri yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, dan sebagai sarana bagi pemimpin untuk memperoleh legitimasi, serta sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik agar terwujud demokrasi yang kuat. Pemilihan umum Kepala Daerah (Bupati) di Konawe Selatan merupakan salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya Desa Ambaipua untuk menyampaikan aspirasinya agar kedaulatan rakyat dapat tercapai. Selain itu, calon bupati dan wakilnya yang nantinya akan menjabat sebagai pemimpin di wilayah Konawe Selatan, membutuhkan legitimasi untuk memerintah. Legitimasi bisa didapatkan jika Pemilihan Umum Kepala Daerah berjalan dengan baik di setiap desa-desa di wilayah Konawe Selatan, terkhusus di Desa Ambaipua. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik agar demokratisasi yang kuat dapat terwujud. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat desa Ambaipua sangat dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember mendatang, karena dengan aktifnya warga desa dalam memberikan suaranya, berarti warga desa Ambaipua juga telah ikut menjadi bagian dalam penentuan masa depan Kabupaten Konawe Selatan dalam lima tahun ke depan. Serta menjadi bagian dalam mewujudkan demokratisasi yang kuat di Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat: Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sesuai dengan Prosedur Tetap Covid-19 telah diselenggarakan dengan baik dan lancar di Balai Desa Ambaipua sebagai tempat penyelenggaraan. Baik dari pihak mitra pengabdian, aparat Desa dan peserta yakni masyarakat Desa Ambaipua menunjukkan kepuasan atas terselenggaranya kegiatan ini. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat pula bahwa tujuan pengabdian yakni meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Ambaipua dalam pemilihan umum kepala daerah dengan tetap mengikuti prosedur tetap pencegahan covid-19 dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait tata cara pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan protap telah tercapai dengan baik. Atas respon positif dari pihak Desa setempat,

tim pengabdian berharap agar kegiatan serupa dan lanjutan lainnya dapat dilaksanakan di Desa Ambaipua pada masa mendatang.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, puji syukur tim pengabdian panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang sehingga dapat menyelesaikan kegiatan berjudul **“Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pilkada Sesuai Dengan Prosedur Tetap (Protap) Covid-19”** sebagai salah satu bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya kami menghaturkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian kegiatan ini, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Halu Oleo Kendari
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHO
4. Bapak Dr.Asril, S.Sos., M.Si
5. Kepala Desa Ambaipua, Bapak Marman, S.Sos
6. Masyarakat Desa Ambaipua
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mendukung dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak, selama kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia. Untuk itu, kami mengharap adanya kegiatan serupa di masa mendatang guna mewujudkan visi Universitas Halu Oleo yakni “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”

## Daftar Pustaka

### Buku

LPPM UHO, *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Internal Universitas Halu Oleo Tahun 2020*, Kendari, 2020.

Sahid Gatara, A.A, *Ilmu Politik, Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Surbakti, R, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

### Internet:

*Memahami Substansi Pendidikan Politik* (Fuad Fachruddin), dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/228181-memahami-substansi-pendidikan-politik>, diakses 23 Juli 2020, pukul 22.24.